



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2018**



Tugu Perbatasan Garuda Perkasa di Kec. Sebatik Utara



Tugu Garuda Pancasila di Kec. Lumbis Ogong



Tugu Khatulistiwa di Kec. Bahau Hulu



Tugu Perjuangan Kemerdekaan RI di Kec. Krayan Hulu



Titik 0 (Nol) Lg. Midang-Ba'kelalan di Kec. Krayan Induk



Pos Menara Pantau di Kec. Sebatik Utara

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA**

Jl. Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor, Kode Pos 77212



Email : [bpp\\_kaltara@yahoo.com](mailto:bpp_kaltara@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib menyusun LPPD sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagai bahan evaluasi SKPD terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dengan adanya laporan ini dapat menjadi tolak ukur dalam Penyelenggaraan Otonomi dan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor,     Maret 2019

**KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**SAMUEL ST PADAN**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19650214 200112 1 002

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Dasar Hukum.....	1
1.2.	Gambaran Umum Organisasi.....	1
BAB II	PROGRAM DAN KEGIATAN	
2.1.	Program dan Kegiatan.....	7
2.2.	Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	8
2.3.	Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.....	9
2.4.	Permasalahan dan Solusi.....	12
BAB III	PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (DEKONSENTRASI)	
3.1.	Dasar Hukum.....	13
3.2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	13
3.3.	Program, Kegiatan dan Realisasi.....	13
BAB IV	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
4.1.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	14
BAB V	PENUTUP .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Dasar Hukum

Biro Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan memperhatikan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 - 2021 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 18 5.5/4070A/SJ, tanggal 13 Oktober 2016 tentang penegasan atau penjelasan atas angka 1 huruf g surat Menteri Dalam Negeri Nomor 88/374/SJ tanggal 11 Oktober 2016 perihal pedoman persetujuan Perda tentang perangkat daerah.

Biro pengelolaan perbatasan negara dibentuk sebagai unsur staf dalam sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis pengelolaan perbatasan. hal ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2016-2021 yakni ***“Berpada dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”*** terutama dalam upaya pencapaian Misi Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### 1.2. Gambaran Umum Organisasi

#### 1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis pengelolaan perbatasan.

Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan perbatasan negara;



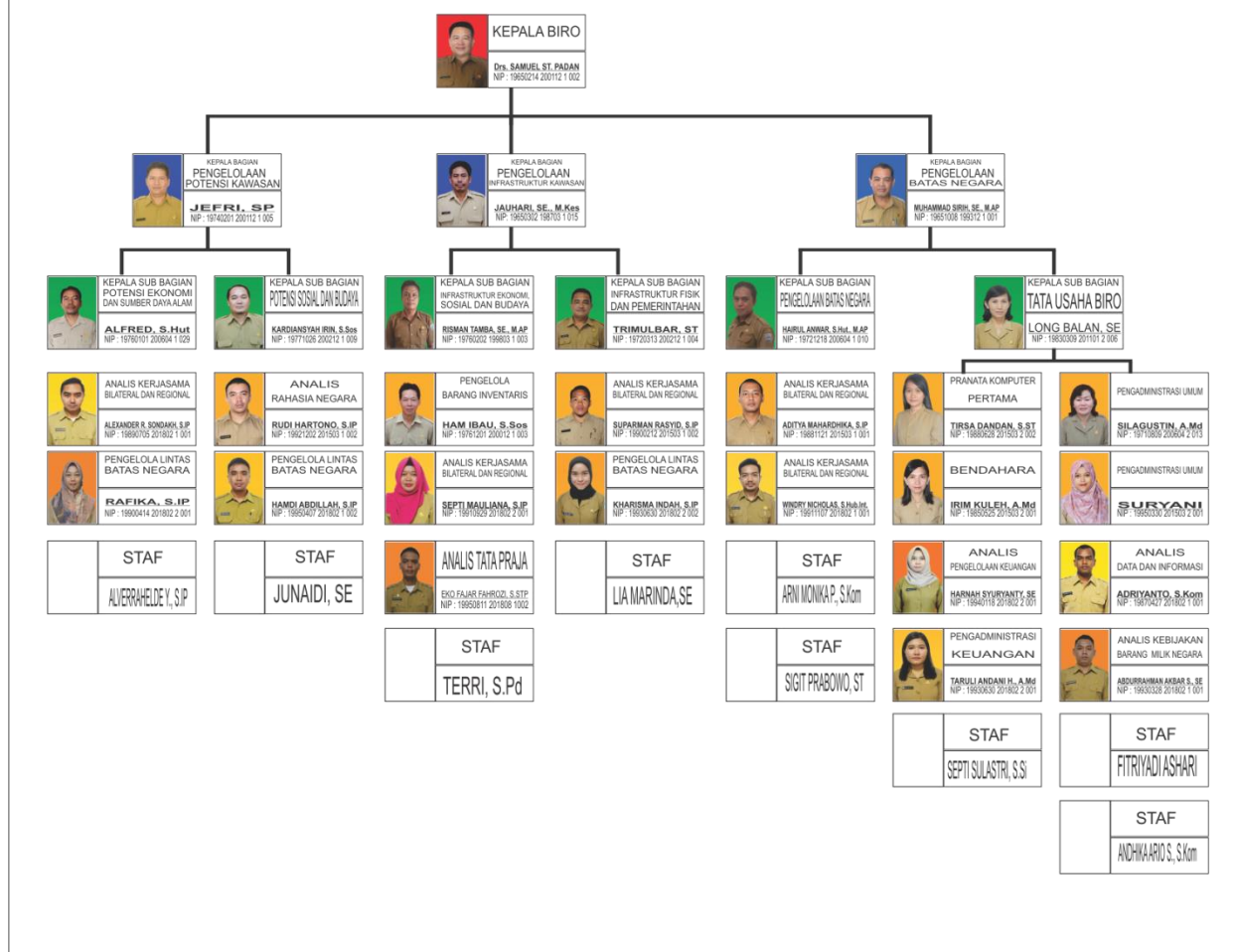
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengolahan batas negara;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan penilaian teknis di bidang pengelolaan potensi kawasan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi di atas, struktur organisasi yang dimiliki adalah sejumlah 9 (Sembilan) pejabat struktural sebagai berikut :

- 1. Kepala Biro
- 2. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, terdiri dari :
  - a. Subbagian Pengelolaan Batas Negara; dan
  - b. Subbagian Tata Usaha Biro.
- 3. Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan, terdiri dari :
  - a. Subbagian Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Subbagian Potensi Sosial dan Budaya.
- 4. Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, terdiri dari :
  - a. Subbagian Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
  - b. Subbagian Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.

## STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Perbatasan Negara**

**Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)**

### 1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dilaksanakan oleh 29 orang ASN dengan preincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**

**Data PNS Menurut Golongan**

NO	UNIT JABATAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
1.	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2.	Kepala Bagian	-	-	-	3	3

3.	Kepala Subbagian	-	-	5	1	6
4.	Pelaksana	-	4	15	-	19
	JUMLAH	-	4	20	5	29

Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)

Tabel 1.2.

Data PNS dan Non PNS menurut Pendidikan

NO	UNIT JABATAN	SMP	SLTA	D III	S 1	S 2	S 3
1.	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-
2.	Kepala Bagian	-	-	-	1	2	-
3.	Kepala Subbagian	-	-	-	4	2	
4.	Pelaksana	-	1	3	15		
	JUMLAH	-	1	3	21	4	

Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)

Tabel 1.3.

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	UNIT JABATAN	ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Biro	-	1	-	-	-	1
2.	Kepala Bagian	-	-	3	-	-	3
3.	Kepala Subbagian	-	-	-	6	-	6
4.	Pelaksana	-	-	-	-	19	19
	JUMLAH	-	1	3	6	19	29

Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)

#### 1.2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Pengelolaan Perbatasan Negara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Nama SOP	Keterangan
1	SOP Surat Masuk	Subbagian Tata Usaha
2	SOP Surat Keluar	Subbagian Tata Usaha
3	SOP Pelatihan Pegawai	Subbagian Tata Usaha

4	SOP Kenaikan Pangkat	Subbagian Tata Usaha
5	SOP Pensiun Pegawai	Subbagian Tata Usaha
6	SOP Kenaikan Gaji Berkala	Subbagian Tata Usaha
7	SOP Pengajuan Cuti	Subbagian Tata Usaha
8	SOP Pengajuan Gaji	Subbagian Tata Usaha
9	SOP Pengajuan TPP	Subbagian Tata Usaha
10	SOP Pengajuan LS	Subbagian Tata Usaha
11	SOP Pengajuan GU	Subbagian Tata Usaha
12	SOP Pemberian Panjar	Subbagian Tata Usaha
18	SOP Penyusunan RKA	Subbagian Tata Usaha
13	SOP Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Subbagian Tata Usaha
15	SOP Penyusunan LPPD	Subbagian Tata Usaha
16	SOP Penyusunan Renja	Subbagian Tata Usaha
17	SOP Penyusunan Rencana Strategis	Subbagian Tata Usaha
19	SOP Pengadaan Barang Jasa	Subbagian Tata Usaha
20	SOP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan
21	SOP Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	Bagian Pengelolaan Batas Negara
22	SOP Pelatihan Garda Batas Bagi Tokoh Masyarakat	Bagian Pengelolaan Batas Negara
18	SOP Peningkatan Edukasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan	Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan

**Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)**

#### **1.2.5. Tujuan**

Untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021, sejumlah tujuan diupayakan pencapaiannya guna berkontribusi pada perwujudan visi tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam peningkatan kualitas SDM, pertahanan dan keamanan dalam rangka penguatan kedaulatan Negara di kawasan perbatasan;
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan daya saing dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya di kawasan perbatasan;
3. Meningkatkan pelayanan BPPN Provinsi Kalimantan Utara.

#### **1.2.6. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 – 2021 tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :



1. Terjadinya percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat di kawasan perbatasan;
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya di kawasan perbatasan;
4. Meningkatnya kapasitas masyarakat di kawasan perbatasan;
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 2.1. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 dalam tabel berikut yaitu :

**Tabel 2.1.**  
**Program dan Kegiatan**

No.	Kode Program & Kegiatan	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>		
<b>1.</b>	<b>4.01.4.01.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	4.01.4.01.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.01.4.01.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.01.4.01.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	4.01.4.01.03.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	4.01.4.01.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	4.01.4.01.03.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	4.01.4.01.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	4.01.4.01.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.01.4.01.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
	4.01.4.01.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	4.01.4.01.03.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah
<b>2.</b>	<b>4.01.4.01.03.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	4.01.4.01.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kantor
<b>3.</b>	<b>4.01.4.01.03.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	4.01.4.01.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal
<b>4.</b>	<b>4.01.4.01.03.79</b>	<b>Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan</b>
	4.01.4.01.03.79.01	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan
	4.01.4.01.03.79.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	4.01.4.01.03.79.05	Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan
	4.01.4.01.03.79.07	Pelatihan garda batasa bagi tokoh masyarakat perbatasan
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan</b>		
<b>5.</b>	<b>4.03.4.01.03.80</b>	<b>Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan</b>
	4.03.4.01.03.80.04	Identifikasi Potensi Sosial dan Budaya Daerah Perbatasan

Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)

## 2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun alokasi dan realisasi anggaran dari program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)		Realisasi Keuangan		Fisik
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.286.523.413,00	1.380.485.342,00	1.251.101.431,00	90,63%	79,16%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	6.468.000,00	64,68%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	31.080.000,00	31.080.000,00	4.785.700,00	15,40%	57,14%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	693.000.000,00	693.000.000,00	608.316.332,00	87,78%	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	4.998.400,00	99,97%	100,00%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	31.075.000,00	88,79%	50,00%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.056.013,00	65.056.013,00	64.951.700,00	99,84%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.660.000,00	60.660.000,00	60.558.250,00	99,83%	100,00%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.767.400,00	33.767.400,00	23.441.500,00	69,42%	33,42%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	152.320.000,00	184.300.964,50	183.897.612,00	99,78%	55,00%
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	185.640.000,00	262.620.964,50	262.608.937,00	100,00%	96,00%
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	94.000.000,00	94.000.000,00	59.096.901,00	62,87%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kantor	94.000.000,00	94.000.000,00	59.096.901,00	62,87%	100,00%

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)		Realisasi Keuangan		Fisik
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	6.038.071,00	6.038.071,00	100,00%	
	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	6.038.071,00	6.038.071,00	100,00%	11,11%
4	<b>Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan</b>	1.516.264.937,50	1.466.264.938,00	1.336.857.304,00	91,17%	
	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	389.960.000,00	439.960.000,00	399.590.500,00	90,82%	100,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	371.848.000,00	371.848.000,00	365.181.364,00	98,21%	100,00%
	Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan	247.600.000,00	147.600.000,00	145.354.254,00	98,48%	100,00%
	Pelatihan garda batas bagi tokoh masyarakat perbatasan	506.856.937,50	506.856.938,00	426.731.186,00	84,19%	100,00%
5	<b>Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan</b>	362.720.000,00	362.720.000,00	356.736.190,00	98,35%	
	Identifikasi Potensi Sosial dan Budaya Daerah Perbatasan	362.720.000,00	362.720.000,00	356.736.190,00	98,35%	100,00%
<b>JUMLAH</b>		3.309.508.350,50	3.309.508.351,00	3.009.829.897,00	90,94%	97,08%

### 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam mendukung kinerja dari Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun sarana yang ada cukup memadai dan mampu menunjang kinerja ASN Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun sarana yang digunakan oleh Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Sarana dan Prasarana Kantor**

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Kondisi Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	New Kijang Innova V M/T Bensin dan Beckled Vinyl	2014	Baik	1

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Kondisi Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Avanza 1.5 G M/T dan Cover Jok	2014	Baik	1
3.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota New Rush	2015	Baik	4
4.	Pick Up	NEW HILUX Double Cabin G M/T Diesel	2014	Baik	1
5.	Sepeda Motor	Vario Techno / 125 FI ISS	2014	Baik	6
6.	Sepeda Motor	HONDA NEW BLADE DOUBLE DISC BRAKE	2014	Baik	3
7.	Sepeda Motor	Honda Vario150 ESP	2015	Baik	5
8.	Scanner	Canon	2014	Rusak	1
9.	Lemari Penyimpanan	Lemari P3K	2014	Baik	1
10.	Mesin Hitung Manual	Kalkulator Casio GX-145	2013	Rusak	2
11.	Mesin Hitung Elektronik	Casio / 12 Digt	2014	Rusak	1
12.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Canon / Portable	2014	Baik	1
13.	Mesin Absensi	Bio Finger / AT-550	2014	Baik	2
14.	Alat Pemotong Kertas	PAPER TRIMER	2013	Baik	1
15.	Tenda	Kapasitas 4 Orang	2014	Baik	1
16.	Lemari Es	-	2014	Baik	1
17.	Kompor Gas (Satu Mata)	-	2015	Rusak	2
18.	Alat Dapur Lain-lain (Blender)	-	2015	Rusak	1
19.	Televisi 32"	Samsung	2014	Baik	1
20.	Loudspeaker	Dazumba	2013	Rusak	1
21.	Loudspeaker	Simbadda	2014	Kurang Baik	3
22.	Dispenser	Miyako	2013	Baik	1
23.	Handy Cam	Sony	2014	Baik	2
24.	Gorden/Tirai	Wana Usaha	2013	Kurang Baik	1
25.	Gorden/Tirai	-	2014	Kurang Baik	1
26.	Lap Top	ASUS SLIM	2013	Baik	1
27.	Lap Top	ASUS TOUCH SCREEN	2013	Baik	5
28.	Lap Top	Asus / PU451LD-WO160G	2016	Baik	1
29.	Note Book	Sony Vaio	2014	Baik	9
30.	Note Book	Asus	2015	Baik	12
31.	Hard Disk	Transcend	2013	Baik	2
32.	Hard Disk	HDD / 003076 WD	2014	Baik	2
33.	Keyboard	Logitech	2013	Rusak	1
34.	Printer	conan pixma mp237	2013	Kurang Baik	6
35.	Printer	Canon / all in one	2014	Kurang Baik	2
36.	Printer	Epson / Dot Matrix Besar	2014	Baik	2
37.	Printer	Epson / Dot Matrix Kecil	2014	Rusak	2
38.	Printer	HP / Laser Jet	2014	Rusak	1
39.	Printer	Epson / L550	2015	Baik	4
40.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Flash Disk Kingston	2013	Baik	2



No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Kondisi Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Mouse E-Blue	2013	Baik	3
42.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	-	2014	Baik	1
43.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	FRONT LINE	2013	Rusak Berat	4
44.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Type OCS	2013	Rusak Berat	8
45.	Proyektor + Attachment	SONY / VPL EX225	2013	Rusak	1
46.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	KENIKA	2013	Rusak	2
47.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Inforce	2014	Rusak	4
48.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Prolink	2015	Baik	2
49.	Camera Electronic	Nikon D90	2013	Baik	1
50.	Camera Electronic	Canon / EOS 600 D	2014	Rusak	1
51.	Camera Electronic	Nikon / Codpix L820	2014	Baik	1
52.	Kompas	-	2014	Baik	1
53.	Sound System	Martin Rolland	2014	Baik	1
54.	Exhaust Fan	Panasonic	2014	Baik	2
55.	Personal Komputer	HP	2013	Baik	2
56.	Personal Komputer	Acer Aspire	2014	Baik	4
57.	Bingkai / Pigura	-	2014	Baik	10
58.	Bendera Merah Putih	Umbul-umbul	2014	Rusak	1
59.	Bendera Merah Putih	Bendera Kecil	2014	Rusak	1
60.	Buku Umum Lain-lain	-	2014	Baik	1
61.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	2
62.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	5
63.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	6
64.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	6
65.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	6
66.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	7
67.	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik	1
68.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	2
69.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
70.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
71.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
72.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
73.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
74.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
75.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
76.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
77.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
78.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
79.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
80.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
81.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
82.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
83.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
84.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
85.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
86.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
87.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
88.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Kondisi Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
90.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
91.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
92.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
93.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
94.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
95.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
96.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
97.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
98.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1
99.	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik	1

**Sumber : Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (2018)**

#### **2.4. Permasalahan dan Solusi**

Kendala yang dihadapi Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola program dan kegiatan yang terlihat dengan adanya beberapa kegiatan yang belum mencapai angka realisasi 100 % antara lain:

1. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor terjadinya pemotongan anggaran pemerintah secara nasional. sehingga terjadi kesulitan untuk menyesuaikan nilai anggaran dengan program/kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu wilayah kerja yang luas dan biaya transportasi yang mahal menjadi kendala dalam mewujudkan visi dan misi Biro Pengelolaan Perbatasan Negara ;
2. Terkait dengan poin 1, terdapat kegiatan yang digeser pelaksanaannya setelah disahkannya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, sehingga penyerapan anggaran terlaksana lebih baik pada saat triwulan ke-empat Tahun Anggaran 2018.

Untuk tahun selanjutnya, beberapa solusi yang ditawarkan adalah :

1. Proyeksi kemampuan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran dapat diketahui bersama sehingga dapat dilakukan penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan terhadap proyeksi anggaran tahun berikutnya sesuai dengan program prioritas Biro Pengelolaan Perbatasan Negara ;
2. Pencapaian realisasi anggaran 90,94% dan realisasi fisik 97,08% merupakan tantangan dan tanggung jawab organisasi untuk kedepannya. Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tanggung jawab untuk dapat mempertahankan capaian realisasi tersebut dan tantangan untuk mencapai target realisasi yang lebih tinggi;
3. Secara internal, para ASN selalu berusaha memahami tugas dan tanggung jawab organisasi

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**(DEKOSENTRASI)**

**3.1. Dasar Hukum**

1. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Adapun Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

**3.3. Program, Kegiatan dan Realisasi**

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2018 tidak mendapatkan anggaran dekosentrasi. Tetapi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan perbatasan negara, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab mengelola kawasan perbatasan Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Utara dan Kegiatan Sosialisasi terhadap Rencana Pembangunan PLBN Labang, Kec. Lumbis Ogong, Kab. Nunukan dan Monitoring terhadap rencana Pembangunan PLBN Sei Menggaris di Kec. Sei Menggaris, Kab. Nunukan

## BAB IV

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### 4.1. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Sepanjang Tahun Anggaran 2018, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan 1 (satu) kerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem kerjasama dengan pihak lain adalah :

- 1) Pengembangan Data dan Informasi kawasan perbatasan, dengan sistem swakelola dengan CV. Wahana Mitra Banguncita.

##### 4.1.1. Mitra Kerjasama

Mitra Kerjasama Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 yaitu :

- 1) CV. Wahana Mitra Banguncita.

##### 4.1.2. Nama Kegiatan

- 1) Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan

##### 4.1.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- 1) Pembuatan Sistem Informasi Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara Rp. 147.600.000,00. Anggaran yang dipergunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

##### 4.1.4. Hasil (output) dari kerjasama

- 1) Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan, menghasilkan Aplikasi/Software Sistem Informasi Kawasan Perbatasan (SIKP)

##### 4.1.5. Jangka Waktu Kerjasama

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA	ANGGARAN
4.01.4.01.03.09.48.07	Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	60 (enam puluh) hari kalender	Rp. 147.600.000,00
	Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 69 Undang – Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD menjadi dokumen laporan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Daerah dan merupakan bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan otonomi dan Pemerintahan Daerah.

Segala hambatan dan tantangan dipastikan hadir dalam setiap usaha mewujudkan tata peemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan untuk mewujudkan Visi, melaksanakan Misi serta pemenuhan Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan terselesaikannya LPPD Tahun 2018 di tingkat SKPD Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tepat pada waktunya.

Selanjutnya, LPPD Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 diharapkan mampu menjadi *outcome* positif dalam tahap evaluasi serta memberikan sumbangsih positif dalam usaha mendapatkan penilaian yang diharapkan, atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.





Ukiran Suku Dayak Kalimantan Utara di Daerah Perbatasan